PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BISNIS

Mercy Gusriyani¹, Yuni Dhea Utari², Ratiwi³, Yuliana⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email : Mercygusriyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis dengan fokus pada analisis hukum kontrak dalam konteks bisnis modern. Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum normatif, studi kasus, dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi tren, pola, dan isu-isu krusial yang muncul dalam praktik bisnis saat ini dari sudut pandang hukum. Hasil temuan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sedangkan hukum ekonomi konvensional lebih cenderung pada aspek keuntungan dan manajemen risiko. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang etika dan hukum bisnis, serta peningkatan edukasi terhadap konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan implementasi perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis di masa mendatang.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Bisnis Modern, Hukum Kontrak, Perspektif Hukum*

ABSTRACT

This research discusses the legal perspective on business agreements with a focus on contract law analysis in the context of modern business. The methodology used includes normative legal analysis, case studies, and a comparative approach. In this study, we identified trends, patterns, and crucial issues emerging in current business practices from a legal standpoint. The findings show that Islamic economic law emphasizes justice, transparency, and risk-sharing, while conventional economic law tends to focus on profit and risk management. Additionally, this research also highlights the importance of financial regulations in maintaining economic stability and providing legal certainty for business entities. Recommendations resulting from this research include the need for a deep understanding of business ethics and laws, as well as increased consumer education regarding rights and obligations in business agreements. This research is expected to make a positive contribution to the understanding and implementation of the legal perspective on business agreements in the future.

Keywords: *Legal Analysis, Modern Business, Contract Law, Legal Perspective*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjanjian bisnis telah menjadi landasan utama dalam interaksi ekonomi modern, memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keamanan investasi di Indonesia (Suhardi, 2002). Paradigma perjanjian bisnis telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif sesuai dengan perkembangan bisnis global (Hariri, 2011). Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum

dalam konteks perjanjian bisnis tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi juga mengatur keseimbangan kepentingan yang beragam di dalamnya.

Dalam konteks ini, Iswandi (n.d.) menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam kontrak memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dan perjanjian yang dibuat. Universitas Indonesia (2011) menambahkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis sangatlah penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan praktik keuangan yang sah dan legal dalam bisnis. Admin (2024) menegaskan bahwa insider trading merupakan praktik keuangan yang sangat dilarang secara hukum, menunjukkan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam mengatur praktik keuangan agar sesuai dengan transparansi, keadilan, dan integritas pasar. Rustandi, Dzikirallah, & Amanna (2024) juga menggarisbawahi pentingnya hukum dalam mengatur kegiatan keuangan di pasar modal guna memastikan adanya transparansi dan keadilan.

Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai cerminan dari sejauh mana perekonomian suatu daerah berkembang atau mengalami peningkatan dalam suatu periode waktu tertentu (Fatimah et al., 2021). Penekanan pada aturan dan dasar hukum yang jelas juga disorot oleh Fatimah dan rekan-rekannya (2022), terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi yang sehat, terutama di sektor perbankan.

2. Rumusan Masalah

Identifikasi dan pemahaman terhadap tantangan serta permasalahan utama yang muncul dalam konteks penerapan perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis menjadi penting (Hayes et al., 2017). Dinamika kontrak dan penyelesaian sengketa yang kompleks menjadi fokus utama, di mana kejelasan aturan hukum dan interpretasi yang akurat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat (Shintya et al., 2016).

3. Tujuan

Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menggali dan menganalisis secara kritis implikasi hukum dalam perjanjian bisnis, termasuk keabsahan kontrak, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum dan bisnis dalam menghadapi dinamika perjanjian bisnis modern.

4. Literature Review

Dalam menjalankan kajian literatur, ditemukan bahwa Suhardi (2002) menyoroti peran vital hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dengan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap investasi. Pemahaman ini didukung oleh Hariri (2011), yang menjelaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian hukum ditentukan oleh kesesuaian dengan karakteristik perjanjian tersebut dan moral yang berlaku. Kontribusi tambahan datang dari Hayes et al. (2017), yang menekankan bahwa teori kontrak yang dipaparkan oleh Scott (2000) menjadi kerangka kerja penting bagi auditor dalam mengawasi manajemen perusahaan secara efektif. Pemahaman teoritis ini menjadi landasan kuat untuk pemahaman lebih dalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang terlibat dalam perjanjian bisnis.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (2022) menyoroti pentingnya aturan dan lembaga penyelesaian sengketa sebagai langkah krusial dalam menjaga transparansi dan keadilan di sektor keuangan. Dengan mengintegrasikan berbagai pemikiran ini,

jurnal ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis di Indonesia.

Dalam konteks ini, Suhardi (2002) menegaskan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Pendekatan yang diusung oleh Hariri (2011) menggarisbawahi bahwa keabsahan suatu perjanjian hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek formal, tetapi juga oleh moralitas dan etika yang mendasarinya. Kontribusi lain dari Hayes et al. (2017) memperkuat pemahaman bahwa teori kontrak menjadi landasan penting bagi praktisi dan auditor dalam memahami kontrak bisnis secara menyeluruh.

B. METODE

Dalam menghadapi kompleksitas perjanjian bisnis dari sudut pandang hukum, penelitian ini menerapkan metode metodologi yang cermat dan menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Metode analisis hukum menjadi dasar utama dalam menjelajahi implikasi hukum dalam perjanjian bisnis. Dalam kajian ini, kami menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik dan regulasi perjanjian bisnis di berbagai konteks hukum. Pendekatan ini kami lakukan dengan mengkaji teori-teori hukum kontrak dan mengidentifikasi isu-isu penting yang terkait dengan dinamika kontrak dan penyelesaian sengketa.

Dalam studi ini, Wahjuningati (2023) menemukan bahwa kontrak baku perusahaan modal ventura memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam konteks penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontrak semacam ini memiliki implikasi hukum yang kuat terhadap struktur perusahaan dan cara modal disertakan. Ambarita (2023), dalam penelitiannya mengenai analisis hukum normatif terkait kontrak dalam transaksi bisnis dari perspektif hukum perdata, menyoroti pentingnya analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan struktur hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis asas-asas hukum dan sistematika hukum kontrak di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pendekatan metodologi ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Khatimah (2022) dan Yunita (2013) menyajikan pandangan terkait perjanjian baku dalam konteks kontrak syariah dan lembaga keuangan syariah, menggambarkan tantangan yang muncul terkait aspek keadilan dan penyelesaian sengketa. Analisis ekonomi hukum juga menjadi bagian penting dari metodologi ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Susila Adiyanta & Widyastuti (2021) dan Djiwandono (2021), yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sanksi hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam analisis hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggali pandangan dari praktisi dan akademisi terkait praktik perjanjian bisnis di sektor jasa keuangan, seperti yang dinyatakan oleh Satory (2015), Novita (2021), Universitas Sumatera Utara (2017), dan Pandoyo & Sofyan (2018). Melalui penggunaan metode studi kasus dan analisis data primer dari wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang perjanjian bisnis dari perspektif hukum. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur hukum terkait perjanjian bisnis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Analisis terhadap sudut pandang hukum terhadap perjanjian bisnis menghasilkan beberapa temuan krusial. Pertama, terdapat perbedaan yang mencolok antara pendekatan hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional. Gani (2023) menyoroti bahwa hukum ekonomi syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sementara hukum ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada keuntungan dan manajemen risiko. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks praktik bisnis masa kini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam menyusun perjanjian bisnis.

Dalam hal ini, Widyasari Dewi (2024) menegaskan bahwa edukasi menjadi fondasi utama untuk melindungi konsumen, mengingat adanya kesenjangan yang besar antara literasi dan inklusi keuangan. Peraturan OJK, seperti yang dijelaskan oleh Respati & Setiawan (2024), juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam POJK 22/2023 sebagai kunci untuk menghindari masalah keuangan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan etika dan hukum bisnis dalam konteks perjanjian bisnis. Tanaya (2023) mengemukakan bahwa etika bisnis mencakup perilaku yang benar dalam berbisnis, termasuk menghormati hak-hak konsumen, karyawan, dan masyarakat secara umum. Di sisi lain, Ilyas (2021) menekankan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, serta mengatur standar dan batasan dalam praktik bisnis.

Agustus (2022) menyoroti signifikansi analisis perjanjian bisnis yang bersifat komparatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan membandingkan berbagai variabel, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola yang muncul dalam praktik bisnis masa kini. Dalam konteks ini, penelitian komparatif menjadi landasan penting untuk memahami dinamika dan perkembangan perjanjian bisnis di berbagai konteks dan lingkungan bisnis. Melalui analisis yang komprehensif dan teliti terhadap perbedaan dan persamaan antara perjanjian bisnis, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang praktik bisnis yang efektif dan efisien, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk meningkatkan keberhasilan bisnis.

Pentingnya pendekatan komparatif juga terletak pada kemampuannya untuk menyoroti perbedaan budaya, regulasi, dan praktik bisnis di berbagai negara atau wilayah. Dengan membandingkan perjanjian bisnis dari perspektif global, kita dapat mengeksplorasi berbagai metode dan strategi yang dapat diterapkan untuk membangun perjanjian bisnis yang kuat dan berkelanjutan di tengah kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berubah. Selain itu, analisis komparatif juga memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan perjanjian bisnis di berbagai sektor industri. Dengan memperhatikan perbedaan dalam perjanjian bisnis antara sektor-sektor tertentu, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih terfokus dan sesuai dengan karakteristik unik masing-masing sektor.

2. Pembahasan

Implikasi temuan terhadap pemahaman kontraktual dalam perjanjian bisnis memiliki dampak yang sangat penting. Wahjuningati (2023) menemukan bahwa kontrak baku perusahaan modal ventura memiliki kekuatan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini menegaskan urgensi dalam memahami aspek-aspek hukum kontrak yang relevan dalam konteks bisnis modal ventura. Menurut Aniday (2024), kepatuhan terhadap kontrak mencakup pemenuhan persyaratan

eksternal dan internal, seperti hukum, peraturan, kebijakan, dan tujuan pencapaian. Ini menekankan pentingnya memahami kontrak tidak hanya dari segi pembuatan dan penandatanganan dokumen, tetapi juga dalam pengelolaan yang terus menerus untuk memastikan kepatuhan dan pencapaian manfaat yang diinginkan.

Selain itu, ResearchGate (2023) menyoroti bahwa dasar hukum suatu perjanjian atau kontrak memiliki implikasi yang berbeda dalam implementasinya, terutama dalam konteks perbankan syariah dan konvensional. Perbedaan dasar operasi ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam menjalankan bisnis dan implementasi kontrak. Dalam konteks perjanjian bisnis, pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum kontrak sangat penting untuk memastikan kepatuhan, perlindungan hukum, dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Hal ini mencakup pemahaman yang baik terhadap tujuan, persyaratan, kewajiban, dan hak-hak yang terkait dengan perjanjian bisnis untuk mencapai hasil yang diinginkan secara hukum dan bisnis.

Dalam lingkup hukum bisnis, regulasi keuangan memiliki peran yang sangat penting. Menurut Wepo (2023), regulasi keuangan memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui sektor perbankan yang menjadi pondasi utama sistem keuangan. Hal ini menandakan bahwa adanya regulasi yang efektif dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko, serta mendorong investasi dan inovasi dalam konteks bisnis.

Harmonisasi hukum kontrak internasional menjadi perhatian penting dalam konteks regulasi keuangan di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam kutipan langsung, Indonesia telah meratifikasi perjanjian UNIDROIT untuk mengatasi wanprestasi dalam kontrak internasional. Selain itu, peningkatan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional menunjukkan kompleksitas hubungan antara negara dengan komunitas internasional, seperti yang dijelaskan oleh Melatyugra (2018) dalam kutipan tidak langsung.

Menurut Simanjuntak et al. (2013), harmonisasi hukum kontrak internasional telah mencapai tahap ratifikasi perjanjian UNIDROIT di Indonesia, yang menjadi langkah penting dalam menangani isu wanprestasi dalam kontrak internasional. Selain itu, Melatyugra (2018) menjelaskan bahwa kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional semakin meningkat seiring dengan interaksi yang semakin intensif antara negara-negara dan komunitas internasional.

Penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian bisnis juga menjadi fokus yang sangat penting. Menurut Hukumonline (2016), melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen dapat mengakses layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil di luar proses pengadilan. Hal ini mengindikasikan urgensi memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan solusi yang cepat, terjangkau, dan efisien bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis.

Dalam perspektif hukum, Soerjono Soekanto (1984) menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban negara untuk memastikan perlindungan tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua individu dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Andri Soemitro (2009) menggambarkan bahwa sistem keuangan memegang peran yang sangat vital dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Implikasinya, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam konteks bisnis

menjadi krusial untuk menjaga keadilan, mengurangi risiko, serta memfasilitasi kelancaran aktivitas bisnis tanpa terkendala masalah hukum yang rumit.

D. KESIMPULAN

Dari analisis mendalam terhadap perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis, dapat disimpulkan beberapa temuan utama yang memiliki signifikansi penting dalam mendukung keberlangsungan praktik bisnis yang beretika dan hukum. Pertama-tama, penelitian ini mengungkap perbedaan yang mencolok antara pendekatan hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional. Hukum ekonomi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, sementara hukum ekonomi konvensional lebih cenderung pada aspek keuntungan dan manajemen risiko (Gani, 2023).

Selanjutnya, temuan penting lainnya adalah mengenai pentingnya regulasi keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi praktik bisnis. Wepo (2023) menyoroti bahwa regulasi keuangan, khususnya dalam sektor perbankan, memiliki peran yang krusial sebagai tulang punggung sistem keuangan, yang memberikan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan serta mendorong investasi dan inovasi.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil dalam perjanjian bisnis. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, murah, adil, dan efisien bagi konsumen (Hukumonline, 2016).

Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis bukan hanya penting dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan penyelesaian sengketa yang adil, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berdaya saing tinggi. Dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, kepatuhan hukum, dan perlindungan hak-hak individu, praktik bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

E. Saran/Rekomendasi (opsional) (kira-kira 50 kata):

Saran dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan implementasi perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis di masa mendatang sangatlah penting untuk memastikan keberlangsungan praktik bisnis yang beretika dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Pendidikan Hukum Bisnis: Perlu adanya peningkatan dalam pendidikan hukum bisnis, baik di tingkat akademis maupun pelatihan praktisi bisnis. Hal ini meliputi pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum dalam perjanjian bisnis, regulasi keuangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Pengembangan Regulasi yang Responsif: Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mengembangkan regulasi yang responsif terhadap dinamika bisnis modern. Regulasi tersebut harus memperhatikan perkembangan teknologi, transaksi internasional, dan perlindungan konsumen agar tetap relevan dan efektif.
3. Peningkatan Kesadaran Etika Bisnis: Pentingnya meningkatkan kesadaran akan etika bisnis di kalangan pelaku bisnis. Ini termasuk pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan hak-hak konsumen, dan praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan.
4. Inovasi dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Terus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan hukum. Hal

ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperluas aksesibilitas bagi konsumen, dan memperhatikan keberagaman praktik bisnis.

5. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan pelaku bisnis swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mematuhi regulasi dengan baik.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian mengenai perspektif hukum terhadap perjanjian bisnis ini. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga sepanjang proses penelitian ini. Tanpa bimbingan dan dorongan dari beliau, penelitian ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan.

Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan penelitian yang telah bekerja sama dengan baik dalam diskusi, analisis, dan sharing ide-ide yang berharga. Kolaborasi dan kontribusi dari semua pihak sangat berarti dalam mengembangkan gagasan dan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada lembaga yang memberikan dukungan finansial untuk penelitian ini. Dukungan finansial tersebut telah memungkinkan penelitian ini untuk dilaksanakan dengan lancar dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Semua kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak di atas sangat berarti bagi kesuksesan penelitian ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja sama yang luar biasa dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2024). Implikasi Hukum terhadap Praktik Keuangan dalam Pasar Modal.
- Agustus, S. (2022). Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap.
- Ambarita, L. M. (2023). Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata.
- Andri Soemitro. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Aniday. (2024). Menavigasi Kesesuaian Kontrak: Praktik Terbaik untuk Bisnis.
- Djiwandono, J. S. (2021). Melembagakan Analisis Ekonomi Hukum. Kompas.id.
- Fatimah, S., Widiarti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi. (2021). Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis.
- Fatimah, S., Widiarti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital).
- Gani, A. A. (2023). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi dan Praktik.
- Hariri, W. M. (2011). Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori Kontrak.
- Hukumonline. (2016). Bersengketa di Sektor Jasa Keuangan? Ini Tata Cara Penyelesaiannya.
- Ilyas, W. B. (2021). Peran Hukum dalam Lingkungan Bisnis. Diambil dari Neraca.co.id.

- Iswandi, F. (n.d.). Hak dan Kewajiban Para Pihak Terkait dalam Perjanjian Kerjasama.
- Khatimah, H. (2022). Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Perjanjian Baku Akad Mudharabah. *Jurnal Al-Hakim*.
- Melatyugra, N. (2018). Perjanjian internasional dalam hukum nasional: Perbandingan praktik negara Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan
- Novita, L. B. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Anjak Piutang: Studi Kasus Tentang Perjanjian Anjak Piutang Antara PT. A Dengan PT. B.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Pandoyo, M., & Sofyan, M. S. (2018). Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis. ResearchGate. (2023). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- Respati, A. R., & Setiawan, S. R. D. (2024). Simak Hak dan Kewajiban Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *Kompas.com*.
- Rustandi, R., Dzikirallah, A., & Amanna, L. A. H. (2024). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia.
- Shintya, R., et al. (2016). Teori Kontrak dan Informasi Asimetris.
- Simanjuntak, P. L. B. R., Karisa, I. A., & Mah, M. P. H. (2013). Prinsip-prinsip hukum dalam kontak internasional
- Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Suhardi, G. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Susila Adiyanta, F. C., & Widyastuti, C. S. (2021). ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1).
- Tanaya, E. P. (2023). Mengenal Etika dan Hukum Bisnis: Pentingnya Memahami Peraturan Berbisnis yang Baik dan Benar. Diambil dari Medium.
- Universitas Indonesia. (2011). Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak.
- Universitas Sumatera Utara. (2017). Kontrak Perkuliahan, Silabus, RPS dan SAP: Metodologi Penelitian.
- Wahjuningati, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
- Wepo. (2023). Regulasi Keuangan dan Stabilitas Ekonomi: Dampak Hukum Terhadap Perbankan.
- Widyasari Dewi, F. (2024). Pahami Hak dan Kewajiban Konsumen Sektor Jasa Keuangan agar Terhindar dari Konflik. *Kompasiana*.
- Yunita, D. (2013). Tinjauan Hukum Kontrak Prinsip Syariah Dibandingkan Dengan Sistem Hukum Perdata. *Neliti*.